

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kesejahteraan masyarakat telah menjadi agenda sentral dalam pembangunan negara-negara di dunia. Pemerintah, sebagai aktor utama dalam pembangunan, memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah, yang tercermin dari pengelolaan anggaran negara secara efektif dan efisien, menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Ramadhanti & Rahmi, 2022).

Pada skala global, negara-negara maju umumnya mencatatkan kinerja keuangan yang konsisten dan kuat yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tingkat pengangguran yang rendah, dan peningkatan signifikan dalam berbagai indikator kesejahteraan sosial. Sebaliknya, banyak negara berkembang termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai kendala dalam mencapai peningkatan pembangunan ekonomi yang tercermin dari kinerja keuangan yang belum optimal dan indeks pembangunan manusia yang relatif masih rendah. Disparitas ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor kompleks, antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita, kapasitas kelembagaan yang beragam, serta desain kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan inklusif.



nesia sendiri pada masa Orde Baru tahun 1966 – 1998 masih dengan
asi kekuasaan yang kuat. Pemerintah pusat memegang kendali penuh
pir keseluruhan aspek pemerintahan yang mencakup penganggaran,

perencanaan pembangunan, dan kebijakan daerah. Otonomi daerah pada saat itu masih sangat terbatas dan hanya bersifat administratif. Di tahun 1998, menjadi titik balik dan jatuhnya rezim Orde Baru yang membuka jalan bagi reformasi dalam bidang pemerintahan secara besar-besaran. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih demokratis dalam mendorong terjadinya desentralisasi kekuasaan di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, di tahun 1999 dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi tonggak pertama sejarah untuk melaksanakan otonomi daerah di Indonesia.

Desentralisasi telah membawa banyak perubahan positif, yakni adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ataupun pemilihan; peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang lebih memudahkan serta turun langsung ke masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih merespons dengan cepat kebutuhan masyarakat di daerah; meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan potensi daerah lainnya untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik; dan dengan adanya desentralisasi, pembangunan diharapkan dapat lebih merata untuk mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah.

Konsep desentralisasi fiskal menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan daerah (dekonsentrasi) dengan kapasitas fiskal daerah (desentralisasi fiskal). Prinsip *money follows function* menjadi esensial dalam pelaksanaan otonomi daerah agar dapat mengalokasikan sumber daya keuangan secara optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Efektivitas alokasi anggaran menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Dalam



desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memiliki peran penting untuk
sajikan kebijakan transfer ke daerah yang responsif terhadap kebutuhan dan

potensi setiap daerah. Selain itu, kemampuan daerah dalam mengelola anggaran secara efisien dan efektif juga dapat menjadi salah satu peranan untuk dapat menentukan kinerja keuangan. Studi empiris menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi akan cenderung memiliki kinerja keuangan yang baik (Esni *et al.*, 2020).

Evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia umumnya dilakukan dengan menganalisis beberapa indikator, seperti pendapatan asli daerah, belanja daerah, serta pengelolaan utang dan kewajiban lainnya. Menurut Tahir *et al.*, (2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melihat dan mengembangkan sumber daya dari suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk membiayai pembangunan dan penyediaan fasilitas pelayan publik di tiap daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi belanja daerah dan pengelolaan kewajiban yang *prudent* juga menjadi hal krusial dalam menjaga stabilitas fiskal serta dapat mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan sehingga dengan pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak dapat dicapai hanya dengan meningkatkan angka produksi atau pendapatan nasional. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan yang dapat mengembangkan tenaga kerja yang produktif, inventif, dan kompetitif di pasar global. Tenaga kerja terampil ini meningkatkan produktivitas, menumbuhkan kreativitas, dan menyediakan



barang dan jasa berkualitas tinggi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berjangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015, arah kebijakan ekonomi Indonesia adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pengukuran keberhasilan perekonomian nasional atau daerah ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pertumbuhan perekonomian nasional merupakan proses perubahan perekonomian yang cenderung ke arah positif yang terjadi secara berkesinambungan dalam periode tertentu. Tingkat produksi barang dan jasa nasional dapat tercermin dalam PDB (produk domestik bruto). Persentase perubahan PDB atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan regional. Peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan pertumbuhan PDB atau PDRB yang positif, namun perkembangan tersebut harus didukung oleh peningkatan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan standar hidup (Amalia & Akbar, 2022).

Data BPS dan DJPB menunjukkan bahwa, kecuali Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, sebagian besar provinsi di Sulawesi mengalami perlambatan sejak tahun 2017. Wilayah Pulau Sulawesi paling diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai 9,58 persen pada tahun 2019, 6,92 persen lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan regional sebesar 6,65 persen. Pertumbuhan PDB Sulawesi Selatan melambat menjadi -0,70 persen pada tahun 2020. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari Pandemi Covid-19 yang menutup sejumlah usaha manusia. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Sulawesi



yang berada di urutan ke-11 masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka -2,07 persen. PDRB

Sulawesi Selatan juga memberikan kontribusi sebesar 3,27 persen terhadap PDB nasional. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp605,14 triliun pada tahun 2022 (atas dasar harga berlaku), Sulawesi Selatan merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian regional Pulau Sulawesi, yang secara kolektif berkontribusi sebesar 7,03 persen terhadap perekonomian nasional. PDB Sulawesi Selatan mencapai Rp19.588,4 triliun, atau 3,16 persen dari PDB.

Keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar konstituennya merupakan indikator lain dari kualitas pembangunan suatu daerah, selain tingkat kemajuan ekonominya. Untuk mencapai pembangunan yang sukses, diperlukan kombinasi yang harmonis antara manajemen keuangan yang baik dan upaya untuk meningkatkan standar hidup individu. Badan Pusat Statistik (BPS) menciptakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan alat untuk mengevaluasi pembangunan manusia dan mengukur kemajuannya di suatu daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja pembangunan manusia di daerah dan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah (Yektiningsih, 2018). IPM digunakan untuk mengevaluasi kemajuan suatu daerah menuju tingkat kehidupan yang layak serta kualitas hidup secara keseluruhan. Selain sebagai metrik untuk menilai kinerja pemerintah, IPM memiliki fungsi strategis sebagai salah satu faktor yang menentukan bagaimana uang didistribusikan, termasuk melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Pembangunan yang berfokus pada manusia perlu disertai dengan alokasi anggaran yang tepat dengan memprioritaskan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan meningkatnya



IPM, diharapkan bahwa berbagai aspek kehidupan masyarakat akan dapat mengalami peningkatan dan mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif utamanya di wilayah Indonesia Timur. Kondisi IPM di Provinsi pada Pulau Sulawesi selama tahun 2018 sampai 2022 dapat dicermati pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Indeks Pembangunan Manusia di Berbagai Provinsi di Pulau Sulawesi

No	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		(satuan indeks)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sulawesi Utara	72,20	72,99	72,93	73,30	73,81
2	Sulawesi Tengah	68,88	69,50	69,55	69,79	70,28
3	Sulawesi Selatan	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82
4	Sulawesi Tenggara	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23
5	Gorontalo	67,71	68,49	68,68	69,00	69,81
6	Sulawesi Barat	65,10	65,73	66,11	66,36	66,92

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dalam Tabel 1.1 di atas dapat diamati pada rentang waktu 2018 hingga 2022 terjadi peningkatan signifikan IPM di setiap provinsi di Pulau Sulawesi. Data BPS menunjukkan perubahan dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. IPM Sulawesi Selatan meningkat dari 72,24 pada tahun 2021 menjadi 72,82 pada tahun 2022, meskipun masih berada di bawah angka normal nasional yaitu 72,91. Peningkatan ini



menunjukkan kemajuan dalam segmen kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, merupakan komponen terbesar dalam perhitungan IPM. Dengan

peningkatan IPM ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat akan semakin membaik, yang tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dari 5,72% menjadi 4,51% dan penurunan proporsi gini dari 0,377 menjadi 0,365. Bagaimanapun, terlepas dari peningkatan nilai IPM, laju pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh penting terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasasti & Musthofa, (2023) menunjukkan bahwa nilai kemungkinan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan berada di atas batas signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa pembangunan keuangan tidak secara khusus mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sebagai pembeda, IPM ternyata memiliki hubungan yang sangat penting dengan tingkat kemiskinan, dengan nilai *likelihood* yang jauh lebih rendah dari 0,05.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun dinilai cukup baik karena berada di atas 60 persen berdasarkan kriteria standar *United Nations Development Program* (UNDP). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan telah terpenuhi dengan lebih baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Kenaikan IPM mengindikasikan bahwa Provinsi di Pulau Sulawesi utamanya Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami ketertinggalan dengan provinsi lainnya melalui laju pembangunannya yang terjaga seiring perkembangan nasional yang terus berkembang dan mengurangi kesenjangan dengan daerah lain. Namun, dalam tabel tersebut kondisi IPM pada Provinsi Sulawesi Selatan masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Utara dan skala Nasional yang pada tahun 2022, IPM Indonesia berada di angka 73,77. Hal

di acuan penting untuk ke depannya setiap provinsi dapat melakukan



pembangunan daerah untuk meningkatkan IPM dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup yang tercermin dalam IPM dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Selanjutnya, ketimpangan yang muncul adalah bahwa meskipun ada peningkatan nilai IPM selama periode tersebut yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, tantangan tetap ada dalam hal penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk terus memusatkan perhatian pada otonomi moneter dan kecukupan bantalan (*cushion adequacy*) dalam mengatur program peningkatan ekonomi yang lebih komprehensif dan ekonomis demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Dalam konteks ini, kemandirian keuangan daerah (X1) dan efektivitas PAD (X2) memainkan peran penting dalam mempengaruhi IPM (Y). Kemandirian keuangan yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran bagi program-program yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatnya kemandirian keuangan dan efektivitas PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan IPM. Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kemandirian keuangan dan efektivitas PAD terhadap IPM. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan masyarakat juga cenderung meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi

melalui pajak dan retribusi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan



kemandirian keuangan dan efektivitas PAD, sehingga berkontribusi pada peningkatan IPM.

Fenomena penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun IPM di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama periode tersebut, masih terdapat tantangan dalam mencapai standar nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan dan efektivitas PAD sambil memanfaatkan pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih baik.

Komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana penunjang pembangunan manusia merupakan faktor penentu utama dalam pencapaian IPM yang tinggi. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif akan menentukan kualitas dan kuantitas layanan publik yang dapat disediakan, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah menjadi cerminan dari keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang optimal dan merata (Winarni *et al.*, 2022). Menurut Sinosi *et al.*, (2021), kinerja keuangan organisasi, khususnya pemerintah daerah, tercermin dari akuntabilitasnya. Lopa *et al.*, (2023) menyoroti bahwa laporan keuangan berkualitas tinggi yang tersedia untuk publik merupakan indikasi keberhasilan keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya harapan masyarakat agar pengelolaan pemerintah dilakukan dengan akuntabilitas dan keterbukaan (Fadil Asri *et al.*, 2023). Analisis ratio keuangan APBD dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk mempertahankan penyediaan layanan publik yang berkualitas, pendapatan

ari dana transfer, pendapatan asli daerah, dan sumber lainnya sangat (Taslim & Pratama, 2021).



Menurut (Nurmuthmainnah *et al.*, 2020) secara umum, kebijakan otonomi daerah masih belum optimal dalam mengurangi ketergantungan fiskal daerah pada pusat. Hal ini disebabkan oleh dominasi belanja rutin dan kurangnya evaluasi kinerja di tingkat daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan, perlu ditingkatkan kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah. Dengan anggaran yang memadai, daerah dapat lebih fokus pada program pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1. 2 Realisasi Tingkat Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	PAD
1	2018	9.252.221.942.175,45	5.295.519.277.687,00	3.948.349.252.423,45
2	2019	9.573.910.861.960,70	5.417.262.552.592,00	4.138.631.215.914,70
3	2020	9.365.471.515.325,67	5.399.732.629.887,00	3.890.209.264.433,67
4	2021	10.009.403.475.558,42	5.426.146.349.398,00	4.469.113.381.188,42
5	2022	8.992.799.689.251,16	4.096.755.656.038,00	4.865.959.663.141,11

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Meskipun sempat menurun pada tahun 2020 akibat wabah Covid-19, data pada Tabel 1.2 menunjukkan tren peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga 2022. Kenaikan yang terjadi didorong oleh sejumlah kebijakan, di antaranya pembebasan denda pajak kendaraan bermotor progresif dan optimalisasi sistem pembayaran pajak secara digital. Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata di tingkat desa juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi



Pada tahun 2022, struktur ekonomi Sulawesi Selatan bertumpu pada primer, terutama pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian, terutama produksi beras memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap

perekonomian provinsi dan bahkan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung padi nasional. Di sisi lain, sektor infrastruktur seperti keberadaan pelabuhan dan bandara, termasuk *Makassar New Port* yang mendukung kelancaran distribusi barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut penelitian Wana dan Juniartika (2021), ratio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia ketika digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Kemampuan suatu daerah dalam mengerahkan sumber daya untuk pembangunan manusia meningkat seiring dengan tingkat kemandirian keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik diindikasikan dengan peningkatan efektivitas PAD, dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan kemandirian keuangan daerah tidak memiliki korelasi yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih belum cukup untuk menopang pertumbuhan pendapatan asli daerah, sehingga tidak memungkinkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat (Digdowiseiso & Satrio, 2022). Temuan kedua studi tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Meskipun menggunakan faktor independen yang sama, penelitian sebelumnya memiliki hasil yang berbeda secara signifikan. Penelitian (Cahyaning & Putri, 2022) mengungkapkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. (Rahma *et al.*, 2022) mengemukakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terbukti signifikan



dengan arah positif yang mampu mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurut (Honggara & Jamaluddin, 2024), kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020-2021 juga dipengaruhi oleh kemandirian keuangan daerah. Namun, analisis mereka menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2021, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terpengaruh oleh efektivitas PAD.

Penelitian Taslim & Pratama (2021) memberikan hasil yang berbeda, yaitu indeks pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD. Penelitian Larasati *et al.* (2023) juga tidak menemukan bukti adanya hubungan parsial antara kemandirian keuangan daerah dan indeks pembangunan manusia Kota Pontianak. Siregar (2023) juga menemukan hasil yang sama, yang mengindikasikan bahwa efektivitas PAD di Kota Pekanbaru masih belum efektif dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanif (2019) yang menggunakan variabel independen berupa kemandirian keuangan dan efektivitas PAD, variabel dependen berupa IPM, dan terdapat satu variabel lain yakni variabel *intervening* yang digunakan berupa pertumbuhan ekonomi yang hasil penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan di ketiga variabel tersebut.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memasukkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi untuk menguji kuat atau lemahnya hubungan antara variabel dependen (indeks pembangunan manusia) dengan variabel independen (kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Adipura *et al.*, (2022) mengindikasikan bahwa efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi



secara langsung dipengaruhi oleh kemandirian keuangan daerah. Temuan penelitian yang diteliti oleh Ahmadi & Marselina (2024) mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Penelitian lainnya oleh Pasaribu & Fadhilah (2022) menemukan bahwa meskipun efektivitas PAD berdampak pada pertumbuhan ekonomi, variabel kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh secara langsung. Menurut Nurhayati & Hamzah (2020), terdapat korelasi langsung antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengolah pendapatan daerah untuk meningkatkan standar infrastruktur dan layanan publik.

Sebagaimana diukur dengan ratio kemandirian dan efektivitas PAD, indeks pembangunan manusia dan kinerja keuangan daerah secara historis menghasilkan hasil yang tidak menentu. IPM Sulawesi Selatan masih berada di bawah Sulawesi Utara, meskipun PAD provinsi tersebut cenderung meningkat. Untuk lebih memahami dampak dari faktor-faktor tersebut dan bagaimana pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai moderator, penelitian ini akan menganalisis data dari 21 kabupaten dan 3 kota antara tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini akan terkait dengan “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan),” diharapkan dapat menambah secara signifikan terhadap pengetahuan yang telah ada dan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang dinamika pembangunan manusia di Sulawesi



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh ratio kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pengaruh ratio efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh ratio kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh ratio efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh ratio kemandirian keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh ratio efektivitas PAD terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh ratio kemandirian keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.



4. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh ratio efektivitas PAD terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan baru dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam memahami dinamika sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menguatkan atau memodifikasi teori-teori yang telah ada.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam sektor publik. Secara teoritis, penelitian ini dapat menguji dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada mengenai hubungan antara kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik yang ada dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dengan variabel, metode, atau konteks yang berbeda sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mekanisme kerja dan interaksi antara variabel-variabel yang diteliti.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi yang cukup luas bagi berbagai pihak. pemerintah daerah dapat memanfaatkan temuan ini untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan mengalokasikan anggaran secara tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai referensi penelitian, serta bagi masyarakat umum



tidak langsung merasakan dampak positif dari kebijakan pembangunan yang efektif.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti akan fokus menguji pengaruh kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan penggunaan data Tahun 2018 – 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengikuti pembahasan penelitian. Untuk menyajikan hasil penelitian dengan baik dan komprehensif, para peneliti menyusun struktur metodologi secara cermat. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, yang masing-masing mengikuti pedoman penulisan skripsi yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Berikut ini adalah susunannya:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan penelitian dijelaskan pada bagian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori yang mendasari penelitian ini dipaparkan dalam bab ini. Bab ini juga mencakup variabel penelitian dan hipotesis yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian yang sistematis, termasuk jenis penelitian, metodologi, jadwal, dan lokasi penelitian. Selain itu, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan, serta metode pengumpulan dan analisis data juga dibahas dalam bab ini.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti memberikan penjelasan mengenai hasil temuan dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan pada bab ini.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran peneliti terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets (1971) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas suatu daerah dalam memproduksi berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya secara jangka panjang. Menurut Sukirno (1985) pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan aktivitas ekonomi yang mengarah pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat, yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian daerah.

Selain itu, menurut Smith (1776) terdapat dua faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan populasi. Unsur pokok dari faktor produksi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok modal. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menurut Solow (1956) yang menekankan bahwa akumulasi modal dan pertumbuhan populasi harus disertai dengan kemajuan teknologi dalam mencapai pertumbuhan jangka panjang sehingga kemandirian keuangan suatu daerah tidak hanya bergantung pada akumulasi modal tetapi juga pada kemampuan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.



ori pertumbuhan ekonomi menekankan pada akumulasi modal, investasi, pengelolaan sumber daya dalam mendorong peningkatan *output* ekonomi

suatu wilayah. Dalam hal kemandirian keuangan daerah, mencerminkan kemampuan daerah untuk mengandalkan sumber pendapatan sendiri yang dapat meningkatkan kapasitas investasi pemerintah daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan, semakin besar alokasi dana untuk infrastruktur dan layanan publik, yang esensial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan indeks pembangunan manusia. Selain itu, efektivitas pengelolaan PAD memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. Dengan pengelolaan yang baik, investasi dapat diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah standar menyeluruh yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kehidupan masyarakat di suatu negara. Dalam menilai efektivitas pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mendapatkan pengakuan internasional sejak diluncurkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990.

Proses penghitungan IPM masih terus disempurnakan di Indonesia. Tujuan dari perubahan yang dilakukan adalah untuk menyediakan data IPM yang lebih akurat dan berguna dalam menggambarkan kondisi masyarakat di Indonesia. Contoh dari perubahan tersebut antara lain pemutakhiran data pendapatan per kapita dan perubahan indikator pendidikan.

Tiga dimensi utama yang digunakan oleh IPM untuk menilai kualitas hidup suatu wilayah (Karyono *et al.*, 2020):



Jumlah panjang dan sehat yang ditentukan dengan menghitung angka harapan hidup saat lahir dengan menggunakan metode yang sesuai

dengan kondisi Indonesia, berdasarkan data kelahiran dan kematian. Menurut pedoman UNDP, nilai harapan hidup maksimum dan minimum-85 tahun untuk nilai tertinggi dan 20 tahun untuk nilai terendah-digunakan untuk membangun indeks harapan hidup. Umur yang panjang adalah tanda pola makan dan kesehatan yang sehat.

- Pendidikan yang ditentukan dengan menghitung rata-rata dan proyeksi tahun sekolah. Istilah “harapan lama sekolah” (HLS) mengacu pada kemampuan seseorang untuk memulai pendidikan formal pada usia 7 tahun. Istilah “rata-rata lama sekolah” (RLS) mengacu pada jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh individu berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Hal ini menunjukkan kapasitas masyarakat untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi.
- Kualitas hidup yang baik dicapai ketika kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ditunjukkan oleh pengeluaran aktual per kapita, yang ditentukan oleh konsumsi dan indeks harga konsumen.

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan gambaran kuantitatif dan kualitatif dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejauh mana hasil yang dicapai memenuhi atau bahkan melampaui tujuan yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kinerja. Kinerja dalam konteks pemerintahan merupakan cerminan dari seberapa jauh suatu organisasi mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasarannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan, seperti yang tertuang dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Permendagri No. 13 Tahun 2006, secara

menekankan bahwa evaluasi kinerja juga harus memperhitungkan



seberapa baik penggunaan anggaran, yang dibuktikan dengan volume dan kualitas *output* yang dihasilkan.

Dalam rangka mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan dan menganalisis pencapaian tujuan fiskal secara teratur, pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk mengevaluasi stabilitas keuangan daerah melalui pendapatan yang optimal dan alokasi belanja yang efektif. Indikator kinerja keuangan yang relevan, seperti ratio keuangan, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi belanja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan fiskal (Lestari & Nugraeni, 2024).

Kemampuan suatu daerah untuk mandiri secara finansial memiliki hubungan yang erat dengan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan dengan baik. Daerah yang memiliki kinerja keuangan yang solid cenderung lebih mampu membiayai sendiri segala aktivitas pemerintahan dan pembangunannya, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Kinerja keuangan yang kuat juga memberikan kebebasan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menentukan fokus pembangunan dan mengalokasikan anggaran secara efektif sehingga kinerja keuangan yang baik akan berdampak positif pada kualitas layanan publik yang diberikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang tercermin dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (Anynda & Hermanto, 2020).

Evaluasi kinerja sektor publik secara fundamental bertujuan untuk mencapai tiga objektif utama (Lubis & Hafni, 2017), yakni:

1. Pengukuran kinerja sektor publik secara fundamental bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Optimalisasi alokasi sumber daya.



3. Mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga publik.

Sari & Riharjo, (2020) menjelaskan bahwa dalam mengukur kinerja keuangan secara spesifik, berbagai ratio keuangan telah dikembangkan. Ratio derajat desentralisasi fiskal, ratio kemandirian keuangan daerah, ratio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), ratio efisiensi keuangan daerah, ratio keserasian belanja, dan ratio pertumbuhan adalah beberapa ratio yang sering digunakan.

2.1.4 Ratio Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan alat analisis yang krusial dalam mengevaluasi kesehatan fiskal suatu pemerintah daerah. Melalui berbagai ratio yang diidentifikasi oleh Mahmudi (2019) yakni ratio kemandirian, ketergantungan, desentralisasi fiskal, dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan dan utang, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan daerah. Spektrum ratio yang luas ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan transparan.

2.1.5 Ratio Kemandirian Keuangan Daerah

Salah satu ukuran utama yang digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan operasional, proyek, dan layanan publiknya tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau provinsi adalah ratio kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi nilai ratio kemandirian, maka semakin besar kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara

utan (Harahap, 2024). Indikator ini menunjukkan tingkat desentralisasi yang dimiliki oleh suatu daerah.



Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah juga dapat ditunjukkan dengan ratio kemandirian keuangan, karena masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam mendanai operasional pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, serta pengelolaan keuangan daerah memiliki sistem akuntabilitas yang efisien (Sopian & Handoyo, 2024).

2.1.6 Ratio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Ratio efektivitas PAD merupakan metrik yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi wilayahnya dan mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Kinerja daerah dianggap efektif jika ratio yang dihasilkan minimal satu (1) atau setara dengan 100% (Fernanda *et al.*, 2023) (Putri *et al.*, 2021). Analisis tren efektivitas keuangan daerah sangat penting untuk memahami perkembangan kemampuan daerah dalam mencapai target PAD. Meskipun suatu daerah belum mencapai efektivitas maksimal pada tahun tertentu, tren positif mengindikasikan peningkatan kinerja secara progresif menuju optimalisasi.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor produksi, kebijakan pemerintah, dan transformasi struktural perekonomian. Kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan

cat secara keseluruhan. Menurut Adipura *et al.* (2022) proses pertumbuhan ekonomi melibatkan pergeseran dari sektor pertanian dan pertambangan ke



sektor industri yang didukung oleh investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Analisis data statistik secara berkala dapat memungkinkan pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan daerah, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), pertumbuhan ekonomi adalah perekonomian di suatu wilayah yang mengalami peningkatan produksi barang dan jasa.. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peningkatan barang modal, peningkatan angkatan kerja, peningkatan teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mengurangi kemiskinan, meratakan distribusi pendapatan, dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan standar hidup masyarakat, anggaran pemerintah yang dikelola dengan baik sangatlah penting, demikian menurut Purohit (2005:72). Dengan mengarahkan sumber daya ke bidang-bidang yang memiliki prioritas tinggi seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, maka hal ini akan menarik investasi, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan produktivitas. Anggaran yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Tekanan politik, pembatasan akses informasi, dan kemampuan sumber daya manusia merupakan beberapa kesulitan dalam menciptakan dan melaksanakan anggaran yang efisien. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengembangkan mekanisme kontrol dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan guna

atkan kualitas pengelolaan anggaran.



2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Muhammad Irfan Hanif (2019) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Ratio Kemandirian Dan Ratio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017).” Penelitian ini menggunakan variabel *intervening* yakni pertumbuhan ekonomi dalam melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitupun dengan variabel efektivitas PAD yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap IPM dan mampu memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Ira Sri Adipura, Sri Rahayu, dan Junaidi (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhan ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019).” Penelitian ini menggunakan variabel *intevening* yakni Indeks Pembangunan Manusia dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM.

Angela Nirmala Maria Lumi; Paulus Kindangen; Ita Pingkan Rorong (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara (Studi Pada 8 Kabupaten Di Sulawesi Utara).” Hasil



penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap IPM; pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif (Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar $(0.0007) < \alpha (0.05)$ dengan nilai koefisien regresi memiliki hubungan negatif 0.175071); Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

Sintia Elmawati Pasaribu dan Nur Hidayah K Fadhilah (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pendapatan Daerah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu Utara).” Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi untuk mengetahui apakah pendapatan daerah memperkuat atau memperlemah variabel kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini ialah kemandirian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan efektivitas dan efisiensi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk variabel moderasi yaitu pendapatan asli daerah tidak dapat memoderasi kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya tidak dapat memperkuat hubungan antara kemandirian fiskal, efektivitas, dan efisiensi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Albert Honggara dan Jamaluddin (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021.” Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Ratio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2021. Ratio Efektivitas PAD tidak berpengaruh



terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021.

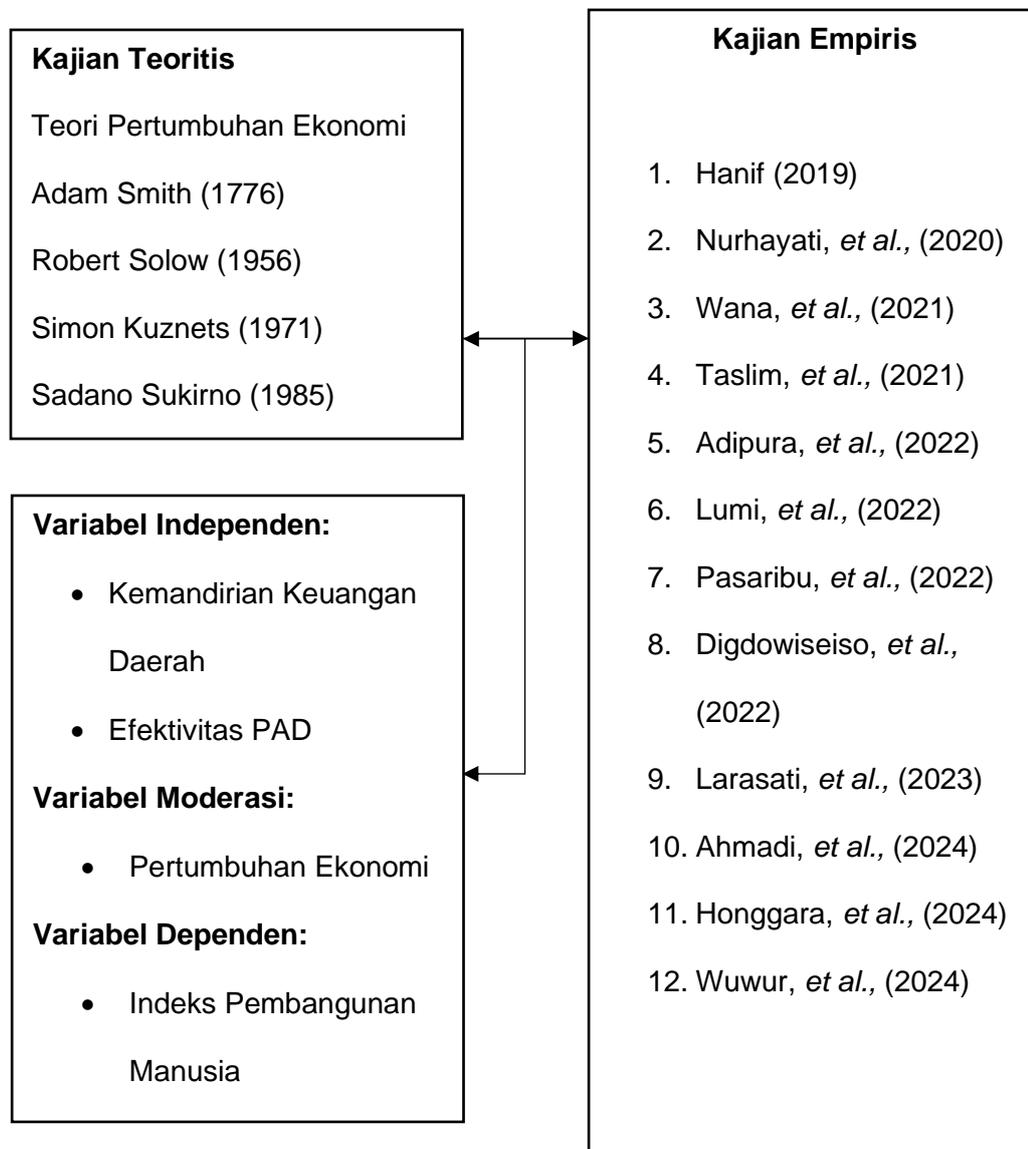
Elisabeth Erniyati Wuwur; Norman Duma Sitinjak; Diyah Sukanty Cahyaningsih (2024) meneliti mengenai “Pengaruh belanja modal dan efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah.” Penelitian ini menggunakan variabel *intervening* yakni kemandirian keuangan daerah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hasil penelitian ini ialah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka pemikiran yang bertindak sebagai dasar penelitian dan sebagai panduan, yang diambil dari tinjauan literatur yang ditampilkan pada Tabel 2.1. Diagram berikut ini memberikan representasi visual dari kerangka pemikiran ini.



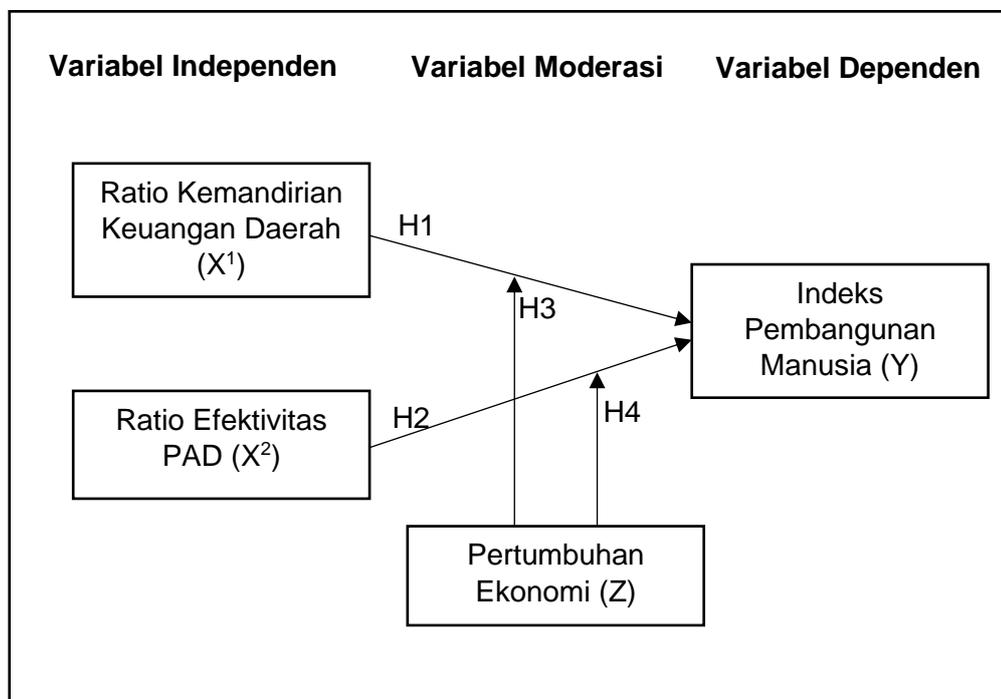
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Kerangka konseptual juga merupakan bagan yang memberikan gambaran kaitan di setiap variabel penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual



Sumber: data diolah peneliti (2024)

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, suatu wilayah perlu untuk melakukan investasi dalam sumber daya manusia agar dapat meningkatkan *output* dan produktivitas. Menurut Halim (2002), ketergantungan suatu daerah terhadap sumber pendanaan dari luar akan berkurang seiring dengan meningkatnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah secara mandiri dan bertanggung jawab dengan mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor produktif dan inklusif, seperti pembangunan manusia, ditunjukkan oleh Suludin & Dewi (2020) yang menemukan adanya korelasi antara rasio kemandirian yang tercermin dari kontribusi PAD terhadap total



pendapatan daerah dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Penelitian Adipura *et al.*, (2022); Hardana & Nasution (2022); serta Honggara dan Jamaluddin (2024) mengindikasikan bahwa ratio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap IPM.

Berlandaskan uraian, disimpulkan hipotesis:

H1: Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.2 Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa alokasi sumber daya yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdampak pada indeks pembangunan manusia. Ratio efektivitas berfungsi sebagai pengukur seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kinerja manajemen pemerintah daerah, maka angka ratio efektivitasnya juga akan mengikuti. Variabel efektivitas PAD memiliki korelasi positif dengan kinerja keuangan, menurut Permatasari & Trisnaningsih (2022). Hal ini menunjukkan bahwa perolehan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, yang memiliki konsekuensi pada biaya realisasi belanja daerah, terutama dalam hal pengeluaran untuk kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Penelitian sebelumnya oleh Adipura *et al.*, (2022) dan Honggara dan Jamaluddin (2024) menemukan korelasi langsung antara efektivitas PAD dan Indeks Pembangunan Manusia.

Berlandaskan uraian, disimpulkan hipotesis:

o efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan



2.4.3 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui konsep pertumbuhan endogen, teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh faktor-faktor internal seperti kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya. Namun, pemanfaatan sumber daya perlu dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, sejalan dengan penelitian dari Wuwur *et al.* (2024) bahwa ratio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang baik terhadap kinerja keuangan daerah, menurut penelitian Ilmi (2023), dan memiliki dampak positif dan besar terhadap indeks pembangunan manusia, menurut Nopriyanto Bahasoan *et al.*, (2019). Fernandes *et al.*, (2022) menemukan hasil yang serupa, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi IPM. Akibatnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan IPM.

Berlandaskan uraian, disimpulkan hipotesis:

H3: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh kemandirian keuangan terhadap indeks pembangunan manusia.

2.4.4 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi berdasarkan prinsip neoklasik sehingga diperlukan kebijakan yang baik dalam



dan pendapatan asli daerah, yang akan menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut penelitian Tajuddin dan Kessi (2024), pendapatan daerah dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan ekonomi. Efektivitas PAD memiliki dampak yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi, menurut penelitian G. N. Sari *et al.* (2019). Pasaribu & Fadhilah (2022) dan Wuwur *et al.*, (2024) telah menemukan variabel serupa, yang mengindikasikan bahwa efektivitas PAD berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berlandaskan uraian, disimpulkan hipotesis:

H4: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh efektivitas PAD terhadap indeks pembangunan manusia.

